

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**

Disusun oleh

ASRUL ASJAK

10564 282 08



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2013

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 326/FSP/A.I-VIII/II/35/2014 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana(S.1) dalam program studi ILMU PEMERINTAHAN di Makassar pada hari Rabu, 26 februari 2014.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Sekretaris

Drs. Muhammad Idris, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si. **Ketua**
2. Dr. H. Mappamiring, M.Si. **Anggota**
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH. **Anggota**
4. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM. **Anggota**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa.
Nama Mahasiswa : Asrul Asjak
Stambuk : 10564 282 08
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

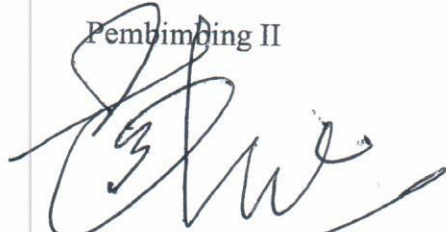
Menyetujui :

Pembimbing I



Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH

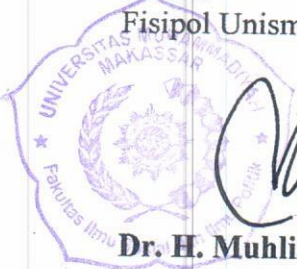
Pembimbing II



Drs. Muhammad Tahir, M.Si

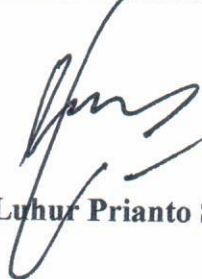
Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Asrul Asjak

Nomor Stambuk : 10564 282 08

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan benar bahwa ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 November 2013

Yang Menyatakan,

Asrul Asjak

ABSTRAK

ASRUL ASJAK. Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Hj. Nuraeni Aksa dan Muhammad Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Terkait dengan peranan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program hingga mencapai hasil maksimal.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif (menggambarkan situasi/kejadian dan dalam bentuk angka-angka) dengan populasi yakni anggota masyarakat penerima BSPS. Sampel yang digunakan adalah sampel total atau jenuh yaitu keseluruhan penerima (BSPS). Penggunaan sampel ini dimaksudkan agar sampel yang dipilih benar-benar mengetahui masalah yang diteliti dan dapat memberi data yang valid (tepat). Untuk menkonfirmasi data yang diperoleh sampel/responden, maka dipilih juga beberapa informan yaitu toko-toko masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan kuesioner (angket). Data dianalisis dengan cara menggabungkan teknik analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemukannya kendala-kendala dilapangan seperti kurangnya peralatan dalam pengimputan data calon penerima bantuan dan masih adanya pemerintah setempat yang kurang aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Oleh karena itu dibutuhkan peran yang lebih aktif oleh pemerintah agar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan Rahmat-Nya jualah sehingga terbuka pikiran penulis untuk mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun bersifat finansial. Oleh karena itu pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Andi Nuraini Aksa, SH., MH selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk selama penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, dorongan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M. Si selaku Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Semua Bapak dan ibu dosen Fisipol Unismuh Makassar Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah berupaya mencerdaskan penulis dengan ilmu pengetahuan baik dari segi kecerdasan Intelektual maupun Emosional yang tidak ternilai harganya.
5. Rekan-rekan mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas kerja sama selama ini dan telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada ayahanda Jakaruddin dan ibunda Asrawati tercinta atas segala do'a dan pengorbanannya yang tiada henti kepada penulis selama ini. Juga kepada Bunda Harni, Nurbaeti, Nuralam, Tetta Nasaruddin, Baso Amir, Sudarsono, Basri Madjid., S.Sos, Bahctiar, Halari. Dan untuk saudara-saudara saya Remiwati, Rahmawati, Rinawati, Riskawati, Irsandi, Harbian Sahman, Syahreni, dan terkhusus untuk adik saya tercinta Asriani Asjak dan Ayu Ningsi Asjak.
7. Sahabat-sahabatku Muh. Sabir Bella, Andra Ardiansyah, Andi Yani, Trisasbianto Muang, M. Arsyil, Ari Nurasri, Khulumuddin, Peri Heryanto, Muh. Arasy. Dan juga saudara-saudaraku dari Rumah Pengetahuan "Panrita" Indonesia, Federasi Buruh Gowa, Kpa. Rekpala Gowa, Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa, Yayasan Insan Cita.

Semoga budi baik dan bantuannya selama ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Demi kesempurnaan skripsi ini. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga karya ini bermanfaat dan memberikan sumbangsi bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran, Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.....	8
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	14
C. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.....	23
D. Pengertian Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.....	29
E. Kerangka Pemikiran.....	33
F. Defenisi Oprasional.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Tipe dan Dasar Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.....	40
B. Tugas dan Fungsi Kelurahan/Desa.....	42
C. Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.....	45
D. Peranan Pemerintah Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.....	47
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Tahun 2013.....	42
Tabel 2 : Tanggapan Responden Tentang Peranan pemerintah dalam perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.....	44
Tabel 3 : Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan tugas pemerintah dalam dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.....	46
Tabel 4 : Tanggapan Responden Tentang kepuasan hasil kerja pemerintah dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.....	49
Tabel 5 : Tanggapan Responden Tentang kelengkapan sarana dan prasarana Kelurahan/Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa...	52
Tabel 6 : Tanggapan Responden Tentang kedisiplinan aparat pemerintah dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.....	54
Tabel 7 : Tanggapan responden tentang etika dan moral aparat dalam dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara besar dalam banyak hal seperti memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam. Indonesia juga memiliki penduduk miskin yang besar pula.

Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan, tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Dengan persoalan kemiskinan ini yang telah menyebabkan jutaan anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karna lapangan pekerjaan semakin minim dan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara terbatas. Kemiskinan jika tidak segera ditanggulangi atau ditangani secara khusus bisa menjadi ancaman suatu bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam Deklarasi Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. "Bahwa kemiskinan adalah ancaman terhadap persatuan, kesatuan, dan martabat bangsa, oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Sebagaimana yang di kemukakan oleh; Edy Suharto, Masalah

kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan Negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Di Indonesia, pentingnya peran Negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik dibidang kesejahteraan rakyat dilandasi oleh perspektif historis, idiologis, logis dan universal.

Secara historis, pendiri bangsa memilih model Negara kesejahteraan dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara idiologis, sila-sila dalam pancasila menegaskan kerinduan Indonesia akan adanya keadilan sosial bagi segenap warga. Secara logis, Indonesia adalah Negara yang berpenduduk lebih dari dua ratus juta jiwa, dengan separuh (untuk tidak menyatakan sebageian besar) warganya masih terhimpit kemiskinan, kebodohan dan ketelantaran. Karenanya sangat absurt jika negeri ini tidak membutuhkan kerelibatan Negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Secara universal, tidak ada system pemerintahan di dunia ini yang tidak memberikan peran kepada Negara untuk menjalankan pembangunan kesejahteraan social.

Keterlibatan pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis karena diperlukan suatu kebijakan yang dapat melahirkan suatu program/kegiatan pembangunan secara terpadu antar pertumbuhan dan pemerintah, termasuk didalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka.

Melihat kesejahteraan sosial Indonesia, sudah semestinya jika para Pemimpin/Pemerintah pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk menengok kembali dan memperkuat konsep manajemen berdasarkan tujuan bernegara untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Negara tercinta ini. Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sbagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang adil dan makmur, sebagai mana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta denagan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Ini berarti, kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform system perekonomian dan system kesejahteraan sosial di Indonesia.

Sejatinya Indonesia adalah Negara menganut paham Negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan model Negara Kesejahteraan Partisipatif (*participatory welfare*) yang dalam literature pekerjaan sosial dikenal dengan dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa Negara harus tetap ambil bagian dalam penanggulangan masalah sosial seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan jaminan sosial lainnya, meskipun dalam oprasionalnya tetap melibatkan masyarakat. Cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk oprasional penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan Abdi Masyarakat memberikan konsekuensi untuk melaksanakan pelayanan secara profesional kepada masyarakat, sebab telah terjadi pergeseran paradigma dimana aparatur pemerintah sebagai agen pembangunan yang akan lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembangunan. Peranan aparatur pemerintah dalam kondisi seperti ini akan lebih banyak berfokus kepada layanan publik. Hal ini sesuai dengan paradigma baru dalam pelayanan yang merupakan suatu konsep yang mengantar seseorang untuk menciptakan realitasnya sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan kebiasaan dari aparatur yang dilayani masyarakat menjadi aparatur yang melayani masyarakat, serta bahwa aparatur pemerintah harus lebih menampakkan abdi masyarakat dibanding dengan abdi Negara sebagai fungsi utamanya.

Harapan peningkatan kualitas aparat pemerintah seiring dengan angin reformasi yang digulirkan mahasiswa dan masyarakat yang menghendaki pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penegakan supremasi hukum serta bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam jalannya roda pemerintahannya sehari-hari, sehingga terwujud *good governance* yaitu cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa di andalkan dan administrasinya bertanggung jawab kepada publik. Dengan itu pemerintah berinisektif membuat program pengadaan rumah ataupun penrenopasian rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang ada diseluruh Indonesia ini melalui Kemenpera dan Kemen PU.

Penyediaan kebetuhan rumah merupakan kewajiban pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Namun, kondisi yang terjadi saat ini adalah kebutuhan rumah masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dan belum maksimalnya kepedulian pemerintah daerah terhadap masalah perumahan, khususnya dalam menjawab kebutuhan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin.

Guna mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat tersebut, kementrian rumah rakyat melalui deputi bidang perumahan swadaya sejak tahun 2006 memiliki program bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS. Pada tahun 2013, program BSPS mempunyai target sebanyak 250.000 unit rumah tidak layak huni berupa kegiatan penanganan peningkatan kualitas rumah yang mengalami rusak sedang (Peningkatan Kualitas/PK) dan perbaikan rumah yang rusak berat membutuhkan

rehabilitas total (Pembangunan Baru/PB). Target sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin dengan penghasilan maksimal Rp. 1.250.000,-(satu jutah lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka secara khusus ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam perencanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam perencanaan program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam evaluasi pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan kajian/masukan bagi instansi yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peranan pemerintah.
2. Sebagai bahan pustaka atau literatur, bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian lanjut untuk masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran, Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik

1. Pengertian Peran

Menurut Sokerkanto Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Novia Peranan adalah fungsi dan kedudukan seseorang baik dalam pemerintahan dan organisasi.

Menurut Belgo Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan :

- a. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan pembuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa peranannya.
- b. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan peranannya.
- c. Harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan peranannya.

Peranan pemerintah dalam pelayanan publik harusnya berperilaku baik dan bijak dalam mengambil suatu keputusan dalam peranannya. Harapan masyarakat akan peranan pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat dan perilaku yang baik kepada masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Dunn (2000) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan sansekerta, yaitu *polis* (negara kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa latin yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Thoha (1999) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) disatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dilain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan insentif. Selain itu, Lasswell dan Kaplan (dalam Thoha, 1999) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah (*a projected profram of goal, value and practices*). Menurut Anderson (dalam Winarno, 2002), kebijakan merupakan arah tindakan yang memunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah dan persolan.

James Anderson menjelaskan suatu kebijakan sebagai suatu tujuan tertentu yang diikuti oleh aktor atau sekelompok aktor dalam menghadapi suatu masalah. Anderson menambahkan suatu elemen dari definisi Dye yaitu keterkaitan antara tindakan pemerintah dan persepsi nyata atau sebaliknya, keberadaan masalah atau tindakan yang memerlukan perhatian. Ini perspektif penyelesaian masalah.

Preston dan Post menwarkan definisi yang berbeda di mana beliau berpendapat bahwa kebijakan sebagai prinsip yang menjadi pedoman dalam bertindak. Preston dan Post menekankan idenya secara umum, dengan mengacu

kepada prinsip dari pada pengaturan tertentu, program, praktek, atau tindakan mereka sendiri selain itu, Preston dan Post juga menekankan pada aktivitas atau perilaku sebagai lawan terhadap ketaatan yang bersifat pasif. Kebijakan publik menurut Preston dan Post mengacu kepada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bertindak dalam kaitannya dengan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini dapat di buat secara eksplisit dalam bentuk hukum dan tindakan formal lainnya dari lembaga pemerintah. Karena itu, Preston dan Post berpendapat bahwa pemaknaan yang sempit dan legalistik dari terminologi kebijakan publik harus dihindari. Kebijakan dapat diimplementasikan tanpa artikulasi formal dari tindakan individual. Preston dan Post menyebutnya dengan istilah kebijakan implisit (*implicit policies*).

Pendefinisian kebijakan publik adalah suatu tindakan yang spesifik yang di ambil secara kolektif oleh masyarakat yang sah, menentukan persoalan yang spesifik yang menjadi perhatian masyarakat. Defenisi ini menekankan pada tindakan tertentu dari pada prinsip. Dan hal ini tidak berarti menghalangi tindakan pemerintah, tetapi mengacu kepada kolektivitas tindakan dan tidak menurut bahwa setiap kebijakan publik harus mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Tindakan spesfik yang akhirnya diambil berkenaan dengan masalah yaitu diputuskan melalui proses kebijakan publik. Pengertian ini mengacu kepada berbagai macam proses di mana kebijakan publik dibuat di dalam negara kita. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang selain berhubungan, di laksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor politik sesuai

dengan tujuan yang telah di seleksi dan bermaksud untuk mencapainya dalam situasi khusus di mana keputusan-keputusan itu secara prinsip berada pada kekuasaan atau kewenangan para aktor.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan hal paling urgen dalam sebuah negara. Pelayanan sendiri menurut kamus besar Indonesia adalah :

1. Perihal atau cara melayani
2. Servis, jasa
3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa

Moenir (2000:26) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Kata pelayanan itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah asing, yaitu *servis*. Menurut reading (1986:60) pengertian *servis* adalah pekerjaan yang harus dilakukan seorang pelayan pada tuannya.

Kencana mendefenisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatau produk secara fisik.

Ada beberapa pendapat yang mendefenisikan tentang pelayanan yaitu:

1. Lukman (2000:6) bahwa, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan, meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
2. Sampara (2000:6) berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan Nasional. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan beras yang murah untuk masyarakat untuk mengurangi beban pengeluaran.

Sinambela (2006:6) berpendapat bahwa terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu: *Reliability* yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; *Tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; *Responsiveness*, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; *Assurance*, yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan empati, yang ditandai tingkat kemampuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Berbicara tentang pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan selalu menuju pada usaha pemuasan pelayanan atau pemberian pelayanan prima. Untuk itulah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui keputusannya Nomor 63 Tahun 2003 menjelaskan prinsip - prinsip pelayanan sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan :
 - 1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.
 - 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Keamanan yaitu proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung Jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

- h. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yang berarti pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Setiap negara dan pemerintahannya tidak terlepas dari suatu kebijakan publik. Charles O. Jones mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standar, proposal, dan grand design. (Charles O. Jones).

Dalam proses kebijakan publik, pemerintah tidak bisa melepaskan faktor lingkungan publik yang merupakan input, proses, dan sekaligus output kebijakan. Dimana proses kebijakannya adalah yang pertama isu kebijakan. Isu kebijakan merupakan agenda pemerintah. Isu ini adalah respon pemerintah dari input yang

diberikan oleh lingkungan publik. Hal ini terkait tentang hal-hal apa yang menjadi isu di masyarakat dan direspon oleh pemerintah sebagai sesuatu yang harus diagendakan untuk dijadikan kebijakan publik. Kedua adalah formulasi kebijakan, yaitu bagaimana pemerintah memformulasikan berbagai isu tersebut sebelum dikeluarkan sebagai sebuah kebijakan publik. Dua tahap proses yang pertama ini adalah proses politik. Yang artinya tahap-tahap tersebut tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Ketiga adalah implementasi kebijakan, yaitu implementasi kebijakan yang telah diformulasikan dan diputuskan oleh pemerintah yang berwenang. Keempat atau yang terakhir adalah kinerja kebijakan, merupakan sebuah evaluasi kebijakan yang telah diformulasikan dan diterapkan dalam masyarakat. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut telah berjalan efektif. Evaluasi kebijakan tersebut merupakan sebuah output kebijakan yang juga berfungsi sebagai umpan balik terhadap proses input kebijakan selanjutnya. Lingkungan kebijakan disini adalah masyarakat yang menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut. Tahap kedua dan tahap ketiga merupakan sebuah proses kebijakan. Yaitu bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan oleh pemerintah dari input dan kemudian implementasinya.

Implementasi kebijakan mulai berkembang sejak tahun 1960, ini adalah era 'pascakeputusan' dari kebijakan publik. Pergeseran studi ini terjadi karena tampak jelas bahwa pembuatan kebijakan di banyak bidang ternyata tidak dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, atau tujuan yang tidak dapat didefinisikan dengan baik, hal inilah yang menyebabkan mahasiswa kebijakan public menggeser perhatiannya dari input dan proses menuju ke output dan hasil.

Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik ; bagaimana organisasi di diluar dan di dalam system politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain ; apa motivasi mereka bertindak seperti itu, koma dan apa yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda. (Jenkins, dalam Parsons, 2001 : 463). Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui, seperti yang dikatakan oleh Anderson: “kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat dia sedang dibuat” (Anderson, dalam Parsons, 2001 : 464). Sama seperti “politik”, politik tidak hanya berhenti ketika keputusan atau output berhasil dibuat, politik juga tidak hanya berbicara tentang bagaimana proses itu dibuat tetapi juga implementasinya di dalam system politik tersebut.

Berkaitan dengan tahap implementasi kebijakan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam implementasi kebijakan. Di mana implementasi kebijakan Merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (arti luas). Implementasi kebijakan meliputi proses dari input, output, dan outcomes. Sehingga dari implementasi kebijakan tersebut, mengubah keputusan atau kebijakan menjadi tindakanoperasional. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan

yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Implementasi sendiri diartikan sebagai cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuan yang juga telah diformulasikan atau yang menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan public. Output dari kebijakan publik bisa menjadi umpan balik bagi perumusan suatu kebijakan, sehingga kebijakan publik tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan publik penjelas. Yang mencakup dalam implementasi kebijakan publik adalah program yang dibuat terkait kebijakan tersebut. Lalu proyek-proyek kebijakan tersebut. Kemudian pengadaan kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan tersebut dan yang terakhir adalah pemanfaat. Dari implementasi tersebut, kita lihat bahwa, apakah kebijakan public tersebut bermanfaat atau sebaliknya.

Implementasi kebijakan meliputi perilaku badan atau lembaga administratif yang bertanggung jawab terhadap suatu program. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah badan-badan atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perumusan hingga pengimplementasian kebijakan publik tersebut, target group merupakan pengertian dari, siapakah yang menjadi sasaran-sasaran dibentuknya kebijakan publik tersebut, sehingga kelompok-kelompok tersebut menjadi target yang menerima implementasi kebijakan, jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Mengingat bahwa dalam implementasi ada faktor-faktor pendukung lainnya yang tidak bisa diabaikan dan harus dipertimbangkan baik saat perumusan maupun implementasi kebijakan tersebut yaitu dampak dari implementasi kebijakan publik, dampak apa yang ditimbulkan,

sehingga kita mengetahui apakah kebijakan tersebut berjalan efektif dan bermanfaat.

Setelah suatu program dirumuskan dan dampak – dampak yang timbul dari kebijakan tersebut dirasakan maka perlu adanya suatu pemahaman akan apa yang terjadi. Disinilah studi implementasi akan digunakan untuk memahami apa yang terjadi pada saat maupun setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Menurut Jenkins studi implementasi adalah studi perubahan : bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam system politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi – motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Parsons 2001: 463). Sehingga studi implementasi kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas atau kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap salah satu atau lebih kekuatan – kekuatan yang menentukan dampak kebijakan (Winarno 2007: 147).

Lebih lanjut menurut Winarno, studi implementasi ini ada untuk menutupi kekurangan yang ada, seperti kekurangan dalam usaha memahami proses kebijakan dan mendorong adanya saran yang kurang baik pada para pembentuk kebijakan (Ibid :148). Sehingga bila dilihat dari sisi sebaliknya, maka tujuan dari implementasi kebijakan untuk menutupi dua kekurangan diatas, yaitu untuk lebih

memahami proses kebijakan dan mendorong saran – saran yang lebih baik bagi para pembentuk kebijakan.

Bila melihat dari analisis kebijakan pada era 1970-an dan era 1980-an dapat dipahami tujuan dari implementasi kebijakan ini lebih mendalami faktor – faktor yang ada dalam kebijakan publik. Bila pada era tersebut analisis kebijakan melupakan dampak birokrasi dan penyedia layanan terhadap efektivitas suatu kebijakan maka studi implementasi akan menutupi kekurangan analisis kebijakan tersebut. Secara sederhana sebagai sebuah cara untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadikan implementasi berhasil (Parsons 2001: 464-5). Bila dibandingkan dengan Sabatier dan Mazmanian, terdapat detail akan implementasi kebijakan ini. Mereka melihat implementasi sebagai sebuah problem control dan organisasi sehingga studi implementasi akan bertujuan untuk menangkap elemen – elemen seperti definisi objek dan perumusan rencana jalannya monitoring rencana; analisa akan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi; dan perubahan – perubahan yang ada untuk memperbaiki kegagalan (Ibid: 476).

Adapun model-model implementasi kebijakan dapat kita kutip dari beberapa ahli, seperti: Van Meter & Van Horn, Mazmanian & Sabatier, Grindle, dan George Edward.

Model Van Meter dan Van Horn, model ini merupakan model yang paling klasik, diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975. Model ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Model Mazmanian dan Sabatier, model ini dinamakan model Kerangka Analisis Implementasi (A Framework for Implementation Analysis), diperkenalkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier pada tahun 1983. Mereka mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka. Proses implementasi kebijakan diklasifikasikan ke dalam tiga variable. Variabel independen (mudah tidaknya masalah dikendalikan). Variabel intervening (kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi). Variabel dependen (tahapan dalam proses implementasi).

Model Grindle, model ini diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, di mana implementasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan ditransformasikan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Model ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Model Edward, George C. Edwards melihat implementasi kebijakan sebagai sebuah studi yang krusial terutama untuk public administration dan public policy. Bagi Edward, implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam mengkaji implementasi kebijakan,

Edwards memulai dengan dua buah pertanyaan dasar: prakondisi – prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan – hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, dia mengajukan empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber – sumber, kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Menurut Edwards, keempat variabel ini bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan.

Secara umum, Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Faktor pertama adalah transmisi, dimana sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yaitu konsistensi, yang menekankan pada pelaksanaan – pelaksanaan yang konsisten dan jelas sehingga memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan faktor yang ketiga adalah kejelasan, yang menjadikan petunjuk – petunjuk kebijakan sebagai sesuatu yang jelas untuk diterima oleh para pelaksana kebijakan. Menurut Edwards, dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi maka dapat diambil generalisasi, yakni bahwa semakin cermat keputusan dan perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan – keputusan kebijakan dan perintah – perintah tersebut dilaksanakan. Dan dalam situasi seperti

ini, penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi kegagalan implementasi.

Sumber – sumber merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber tersebut meliputi : staf yang memadai serta keahlian – keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas – tugas mereka, wewenang dan fasilitas – fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul – usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan – pelayanan publik. Staf yang dapat mengimplementasikan kebijakan dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas yang dapat menjadi administrator – administrator yang kompeten. Dari sisi informasi, terdapat dua bentuk yang harus diperhatikan yaitu informasi mengenai bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan sebagai data tentang ketaatan personil – personil lain terhadap peraturan pemerintah. Dan bentuk lain dari sumber adalah wewenang yang berhubungan pada keterbatasan atau kekurangan bagi pejabat untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah fasilitas – fasilitas fisik untuk memjembatani pelaksanaan kebijakan tersebut, misal sebagai tempat koordinasi, perlengkapan dan perbekalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber – sumber ini sebagai bentuk realisasi dari perencanaan kebijakan yang telah dibuat.

Pada faktor yang ketiga terdapat kecenderungan – kecenderungan, yang menekankan pada tanggapan – tanggapan dari para pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan menanggapi baik suatu kebijakan, maka dapat diharapkan adanya dukungan dan kemungkinan besar terjadi pelaksanaan kebijakan yang dimaksud. Demikian pula jika terjadi perbedaan persepsi antara para pembuat

kebijakan dan pelaksana kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dan faktor yang terkahir, yaitu Struktur Birokrasi yang secara keseluruhan menjadi badan pelaksana kebijakan. Karena terdapat banyak ragam struktur birokrasi maka hal ini akan berpengaruh pada: perubahan – perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumber – sumber, menimbulkan tindakan – tindakan yang tidak diinginkan, menghalangi kondisi, membingungkan pejabat – pejabat pada yuridiksi tingkat yang lebih rendah, menyebabkan kebijakan – kebijakan berjalan dengan tujuan yang berlawanan, dan menyebabkan beberapa kebijakan menempati antara keretakan – keretakan batas – batas organisasi.

Studi Kasus Pengimplementasian kebijakan publik sudah sepatutnya mendapatkan perhatian khusus, seperti sebagaimana yang dikatakan Anderson tahap implementasi itu sendiri adalah bagian dari pembentukan kebijakan public. Berangkat dari sini (mungkin lebih tepatnya sebagai kegagalan operasionalisasi kebijakan) akan ada evaluasi yang kemudian akan menjadi umpan balik untuk menjadi agenda kebijakan selanjutnya.

C. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang

menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan berbagai program pembangunan nasional 2004 - 2009 yang dijabarkan dalam rencana strategis kemenpera 2005 - 2009. Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian pembangunan perumahan pada periode sebelumnya, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka ditetapkan Visi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 - 2014 sebagai berikut : Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni. Pencapaian visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. kementerian Perumahan Rakyat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pencapaian visi tersebut memiliki kewenangan sebagai regulator,fasilitator maupun pelaksana pembangunan perumahan sehingga terpenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga indonesia.

Rumah diketahui tidak hanya berfungsi sebatas tempat tinggal tapi juga memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peradapan bangsa, hal ini tercermin dalam undang-undang no 1 tahun 2011. Saat ini, lebih dari 80% pemenuhan kebutuhan tinggal di Indonesia dilakukan sendiri oleh masyarakat swadaya. Angka tersebut cukup signifikan namun dari hasil pembangunan perumahan swadaya masih banyak terdapat perumahan yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan masyarakat baik dari sisi ekonomi,

kemampuan ketrampilan teknis, keterbatasan kepada akses sumber kunci bidang perumahan yang ada. Untuk itu keswadayaan masyarakat inilah yang harus ditumbuhkembangkan agar pemenuhan kebutuhan perumahan swadaya yang layak huni dapat terpenuhi.

Kondisi perumahan dan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang sinergis dan melingkupi berbagai sektor (multi sektor) dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar menyangkut taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, rumah kebanyakan dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan berbagai perumahan yang dibangun daerah di Indonesia masih banyak yang tidak memenuhi standar sebagai rumah yang layak huni.

Deputi Bidang Perumahan Swadaya merupakan salah satu Deputi yang mempunyai peran besar di dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan secara mandiri dan swadaya. Perumahan Swadaya diartikan sebagai rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara berkelompok maupun secara individu. Perumahan swadaya mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan rumah secara nasional.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya telah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS). Program ini merupakan program yang akan menyentuh langsung untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini berupa pemberian bantuan untuk peningkatan kualitas rumah yang dibangun secara swadaya masyarakat.

Penyelenggaraan rumah swadaya secara utuh, tidak hanya sebatas peran para pemangku kepentingan saja. Namun diperlukan suatu kebijakan yang sangat strategis terutama kebijakan dengan prinsip-prinsip utama yaitu good governance. Sejak tanggal 1 Agustus 2011 bantuan stimulan perumahan swadaya telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang lingkup pengaturannya terdiri dari tujuan dan lingkup bantuan stimulan perumahan swadaya, kriteria dan persyaratan penerima bantuan, pelaksanaan bantuan stimulan dan pelaksana kegiatan serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan BSPS tidak terlepas dari dukungan dari organisasi pelaksanaan kegiatan, meliputi organisasi pelaksanaan tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Tiap organisasi harus melakukan koordinasi satu sama lain. Selain itu, tiap organisasi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan, khususnya pada masyarakat calon penerima bantuan. Sosialisasi dan pemberdayaan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan perumahan swadaya.

Organisasi pelaksanaan BSPS terdiri dari organisasi tingkat pusat, organisasi tingkat provinsi dan organisasi tingkat kabupaten/kota/. Organisasi

pelaksanaan BSPS di tingkat pusat terdiri dari tim pembina yang terdiri dari Menteri Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya. SKPD Pusat diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat dan keanggotaannya terdiri dari unsur deputi Deputi Bidang Perumahan Swadaya, unsure Biro Perencanaan dan Anggaran serta unsur Pusat Pengembangan Perumahan. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos yang ditunjuk sebagai penyalur dana bantuan stimulant perumahan swadaya. Konsultan Manajemen Pusat (KMP) merupakan konsultan yang akan membantu tugas manajemen Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kelompok Kerja Pusat dalam pelaksanaan BSPS.

Organisasi pelaksanaan BSPS ditingkat provinsi terdiri dari pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. SKPD Provinsi diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur dan keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD yang menangani bidang perumahan, SKPD yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta unsur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Organisasi pelaksanaan BSPS di tingkat kabupaten/kota terdiri dari pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. SKPD Kabupaten/Kota diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD yang menangani bidang perumahan/PU, SKPD yang menangani bidang social, unsur Bappeda kabupaten/kota, bidang pemberdayaan masyarakat serta unsur Badan Pertanahan tingkat kabupaten/kota. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) / BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), adalah organisasi masyarakat ditingkat kelurahan/desa yang ditunjuk oleh kepala

SKPD bidang perumahan dengan tugas utama untuk membantu SKPD tingkat kabupaten/kota. TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat) ditetapkan oleh SKPD (Pokja) kabupaten/kota baik yang direkrut oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau perorangan yang akan membantu pelaksanaan bantuan stimulan di daerah.

Dalam implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam proses perealisasiannya, baik itu sifatnya mendukung maupun menghambat. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor pendukung dalam implementasi program BSPS di kecamatan itu adalah ketika koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa itu berjalan dengan baik, sosialisasi program BSPS di tingkat kelurahan/desa berjalan dengan baik khususnya ditingkat lingkungan RT.RW / dusun, tersedianya peralatan-peralatan guna mendukung persuratan dan administrasi yang akan digunakan selama proses kegiatan berlangsung. Adapun faktor penghambat dalam implementasi program BSPS di kecamatan adalah ketika koordinasi pemerintah kecamatan ke bawah sampai jajaran tingkat lingkungan RT.RW / dusun tidak berjalan, sosialisasi program tidak berjalan, alat pengadaan persuratan dan administrasi tidak ada ataupun tidak lengkap.

Kedua faktor di atas sangatlah mempengaruhi kelancaran implementasi program bantuan stimulan swadaya (BSPS) ditingkat kecamatan.

D. Pengertian Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi

1. Perencanaan

Pengertian Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Beberapa ahli lain merumuskan perencanaan sebagai mengatur sumber-sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Menurut Wilson, Pengertian Perencanaan merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang di wakili oleh perencanaan itu. Perencanaan itu meliputi analisis, kebijakan dan rancangan.

Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa datang dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat di wujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan.

2. Pelaksanaan

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan

manejerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. *Actuating* adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti Leadership (pimpinan), perintah, komunikasi dan *conseling* (nasehat).

Actuating disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Dari pengertian di atas, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan

secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan (actuating) ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika a. Merasa yakin akan mampu mengerjakan

- b. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagidirinya,
- c. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting,
- d. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan
- e. Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

Fungsi dari Pelaksanaan (actuating) adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

3. Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Tujuan evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Dalam proses penilaian, dilakukan perbandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil dihimpun dengan kriteria tertentu, untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskan kebijakan tertentu. Kriteria atau tolak ukur yang dipegang tidak lain adalah tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pendidikan itu dilaksanakan.

Dari aspek pelaksanaan, Evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan.

Berdasarkan beberapa rumusan di atas dapat didefinisikan bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu kegiatan pendidikan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum. Teknis pelaksanaan evaluasi meliputi penetapan objek yang akan dievaluasi, menentukan instrumen yang cocok dengan apa yang akan dievaluasi, melakukan pengukuran terhadap objek evaluasi,

mengumpulkan data hasil pengukuran data mengolah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Berdasarkan data pengukuran dapat dijadikan sebagai rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keputusan.

E. Kerangka Pemikiran

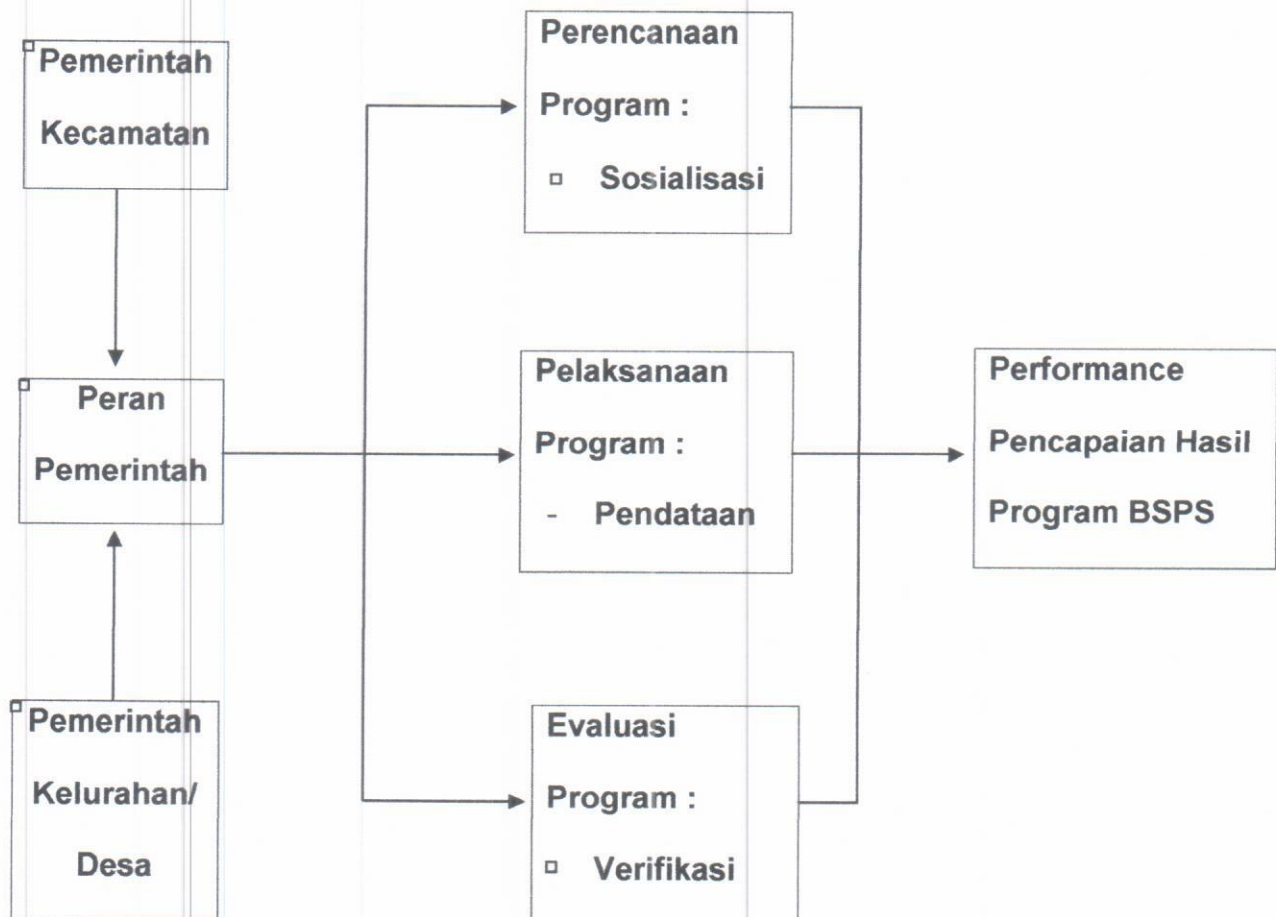
Kebutuhan sandang dan pangan untuk masyarakat sangatlah penting karena merupakan pokok utama dalam kebutuhan sehari-hari. Salah satu langkah sistematis yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya program BSPS yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Peranan pemerintah seharusnya memberikan yang terbaik pada masyarakat terutama dalam pelayanan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk masyarakat kurang mampu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang layak mendapatkannya sehingga mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat utama. Karena dengan pelayanan, ketika masyarakat memerlukan atau mengurus sesuatu dikantor bukan pemerintah sibuk dengan urusannya yaitu bukan pemerintah melayani pemerintah tapi pemerintah melayani masyarakat.

Peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terutama dalam pengimplementasian kebijakan, selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu diperhatikan demi kelancaran pelayanan ini baik dari kemampuan pemberian pelayanan dalam hal ini pemerintah, maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan tersebut.

Untuk lebih jelasnya dibawa ini terdapat gambaran kerangka konsep yang menjadi landasan pemikiran, yaitu :

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



E. Defenisi Oprasional

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka akan diperjelaskan tentang cakupan depinisi operasional :

1. Peranan merupakan fungsi untuk melaksanakan tugas untuk menjalankan suatu peranannya. Perilaku pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus memberikan yang terbaik dan masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan pemerintah. kedudukan (status) seseorang dalam suatu jabatan yang mempunyai peranan penting dan menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya ia menjalankan suatu peranan baik dalam pemerintahan maupun organisasi.
2. Peran pemerintah yang dimaksud adalah peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam mengimplementasikan program BSPS.
3. Implementasi program BSPS mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
4. Perencanaan program adalah perumusan program yang akan dilaksanakan.
5. Pelaksanaan program adalah pelepasian dari perumusan yang telah ada.
6. Evaluasi adalah pementauan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program.
7. Pencapaian hasil program adalah output program
8. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang spesifik yang di ambil secara kolektif oleh masyarakat yang sah, menentukan persoalan yang spesifik yang menjadi perhatian masyarakat.
9. Pelayanan publik merupakan pekerjaan yang harus dilakukan seorangpelayan terhadap tuannya. Dalam artian pemerintah harus memberikan pelayanan

yang terbaik untuk masyarakat. Sangat perlunya interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat terutama kebutuhan yang diharapkan masyarakat dalam pelayanan.

10. Indikator pelayanan publik ialah : kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kemampuan institusi dalam pelayanan akan kebutuhan masyarakat. melayani masyarakat dengan cepat etika dan moral dalam memberi pelayanan kepada masyarakat agar puas terhadap pelayanan. pelayanan akan kebutuhan masyarakat yang Seharusnya pemerintah melayanin pemerintah bukan pemerintah melayani pemerintah.
11. Peran Dinas PU adalah melakukan sosialisasi program BSPS dan memferifikasi data yang telah dimasukkan oleh UPK dan TPM.
12. Peran Camat adalah membantu UPK dan TPM mensosialisasikan program BSPS kepada Desa/Kelurahan yang ada dikecamatan itu.
13. Peran Desa/Lurah adalah membantu UPK dan TPM mensosialisasikan program BSPS kepada masyarakat yang ada di Desa tersebut.
14. Bantuan perumahan swadaya sangat membantu beban pengeluaran masyarakat yang kurang mampu yang layak untuk diberi.
15. Target sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin dengan penghasilan maksimal Rp. 1.250.000,-(satu jutah lima ratus ribu rupiah) per bulan.
16. Klasifikasi rumah penerima BSPS adalah keadaan dinding, atap dan lantai yang tidak layak huni.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan. Lokasi penelitian dikantor pemerintahan Kabupaten Gowa khususnya pada kantor Kecamatan Bontonompo yang didasarkan bahwa kantor Kecamatan Bontonompo merupakan salah satu lembaga yang melakukan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

B. Tipe dan Dasar Penelitian

Adapun tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran tentang peranan pemerintah dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
2. Dasar penelitian yang dilakukan survey yaitu pembagian koesioner kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Kepala Keluarga penerima bantuan BPS sebanyak 40 kepala keluarga yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan. Masing-masing 21 kepala keluarga di desa Bontolangkasa, 6 kepala keluarga di desa Bategulung dan 13 kepala keluarga

di kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, dan juga ditambah oleh informan sebanyak 6 orang.

2. Sampel

Teknik penarikan sampel yaitu menggunakan sampel total atau jenuh yaitu keseluruhan kepala keluarga dari jumlah populasi yaitu 40 orang kepala keluarga sebagai penerima bantuan.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada dua jenis data, yakni data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data Kualitatif adalah data-data yang tidak berbentuk angka, tetapi cukup menggambarkan suatu keadaan yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
- b. Data Kuantitatif yaitu data-data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh pengguna data, yang diperoleh melalui wawancara secara intensif terhadap beberapa responden, serta hasil dari penyebaran kuersioner terhadap responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti secara langsung terhadap objek penelitian dimana penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk mengamati dan meninjau aktifitas secara langsung.
2. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang disediakan diantara wawancara langsung.
3. Koesioner atau angket daftar sejumlah pertanyaan yang mengacu pada variabel-variabel penelitian yang nantinya dibagikan pada responden.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam mengelolah data adalah dengan menggabungkan teknik analisis dengan pendekatan kuantitatif (hasil analisis koesioner) dan kualitatif (hasil wawancara) yang diimput dan diuraikan dalam bentuk tabulasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

Gowa adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang diapit oleh kabupaten Takalar dan Kota Makassar. Kabupaten Gowa identik dengan kejayaan kerajaannya dimasa lalu. Kerajaan Gowa sendiri sebelum terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera). Salah satu kecamatan di Gowa ialah kecamatan Bontonompo.

Bontonompo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini bisa ditempuh dengan perjalanan lebih 45 menit

dari Kota Makassar. Memiliki beberapa desa yaitu Desa Barembeng, Desa Bategulung, Desa Bontobiraeng, Desa Bontobiraeng Selatan, Desa Bontolangkasa Selatan, Desa Bontolangkasa Utara, Desa Bulogading, Desa Kalebarembeng, Desa Katangka, Desa Manjapai, Desa Romanglasa dan terdapat 3 Kelurahan, yaitu kelurahan Bontonompo, Kelurahan Kalaserena dan Kelurahan Tamallayang. Sekarang Bontonompo telah dibagi menjadi dua bagian wilayah yaitu Bontonompo dan Bontonompo selatan. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, PNS, dan sebagian lagi lainnya wiraswasta. Padi dan bata merah merupakan produksi lokal andalan karena Bontonompo sebagian besar merupakan daerah yang dikelilingi oleh sawah - sawah milik warga setempat. Bontonompo telah banyak menghasilkan tokoh terkenal mulai dari pemerintah daerah sendiri, professor, Bupati dan Gubernur.

Kecamatan Bontonompo sendiri dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Bontonompo adalah Tamallayang dengan jarak sekitar 16 km dari Sungguminasa, ibu kota kabupaten Gowa. Bontonompo pada bagian timur berbatasan dengan Kec. Pombangkeng Utara Kab. Takalar, Selatan dengan Kec. Bontonompo Selatan, Barat dengan Bajeng Barat dan Kec. Galesong Selatan, sebelah utara dengan Kec. Bajeng.

Jumlah penduduk Kecamatan Bontonompo pada tahun 2008 sebesar 39.936 jiwa, terdiri dari 19.182 jiwa laki-laki dan 20.754 jiwa perempuan 20.754 jiwa serta 99,97 persen dari jumlah itu beragama Islam. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Bontonompo seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak 14 unit, Sekolah Dasar Negeri 12 unit, Sekolah

Dasar Inpres 15 unit, Sekolah lanjutan pertama lima unit, sekolah lanjutan atas satu unit, Sekolah Menengah Kejuruan dua unit, Madrasah Ibtidaiyah empat unit, Madrasah Tsanawiah dua unit, PAUD SPAS 14 unit. Sarana kesehatan Puskesmas dua unit, pustu 14 unit. Terdapat pula sarana ibadah (masjid dan gereja), pasar, aula dan lain-lain.

B. Tugas dan Fungsi Kelurahan/Desa

Penyelenggara pemerintah kelurahan/desa dilaksanakan oleh kepala kelurahan/kepala desa dan perangkat kelurahan/desa. Selain itu, dalam kelurahan/desa juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan kelurahan.

1. Kepala Kelurahan/Kepala Desa

Kepala kelurahan/kepala desa adalah pemimpin kelurahan/desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat dari pegawai negeri sipil sedangkan kepala desa diangkat melalui proses pemilihan umum. Lurah/kepala desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, lurah/kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan/desa.
- b. Pemberdayaan masyarakat.

- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Lurah/kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, lurah/kepala desa juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Sesuai dengan konsep otonomi yang telah tertuang dalam undang-undang.

2. Perangkat Kelurahan/Desa

Perangkat kelurahan/desa terdiri atas sekretaris kelurahan/desa dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan/desa bertanggung jawab kepada lurah/kepala desa

3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/desa dalam memperdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan/desa pembentukannya dilakukan dan diprakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga kemasyarakatan ini mempunyai tugas membantu lurah/desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyuluhan aspirasi masyarakat
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan serta partisipasif.
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalah gunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan ini di kelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipasif. pengurus lembaga kemasyarakatan di pilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Adapun tata kerja kelurahan/desa tersebut adalah :

1. Lurah/kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerja.

2. Perangkat kelurahan/desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada lurah/kepala desa.
3. Setiap pemimpin satuan kerja tingkat kelurahan/desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
4. Setiap pemimpin satuan kerja di kelurahan/desa wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Dalam penyelenggaraan desa maupun kelurahan, tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang bisa mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

C. Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Untuk melihat lebih rinci jumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1 : Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Tahun 2013.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima
1	Bontolangkasa	21
2	Bategulung	6
3	Tamallayang	13
	Jumlah	40

Sumber : Kantor Kecamatan Bontonompo, 15 September 2013

Dari data diatas memperlihatkan jumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terbagi di desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, yaitu 21 kepala keluarga di desa Bontolangkasa, 6 kepala keluarga di desa Bategulung dan 13 kepala keluarga di kelurahan Tamallayang. Penentuan penerima BSPS diatas adalah merupakan hasil kerja TPM Bontonompo yang kemudian dilaporkan kepada dinas terkait di Kabupaten Gowa dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Data ini kemudian di verifikasi oleh PU, hasil verifikasi ini diserahkan kepada Kementrian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) selaku pelaksana Program BSPS tersebut. KEMENPERA kemudian melakukan verifikasi ulang data yang ada lalu setelah itu mengeluarkan hasil verifikasasi dari data verifikasi yang diberikan kepada mereka oleh Dinas PU dan menetapkan daftar nama kepala keluarga penerima BSPS yang berada di Desa dan Kelurahan yang ada didata verifikasi.

D. Peranan Pemerintah Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, memang diperlukan peran aktif pemerintah daerah baik dalam fase perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi program.

1. Peranan pemerintah dalam perencanaan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bagian penting dari program penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam hal penanggulangan rumah layak huni. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar, yaitu dengan adanya program rumah layak huni tersebut.

Peranan pemerintah dalam perencanaan program sangat penting untuk membantu masyarakat, khususnya untuk keluarga miskin ataupun kurang mampu. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya nanti betul-betul tepat sasaran atau sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berikut tanggapan responden tentang peranan pemerintah dalam perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Tabel 2 : Tanggapan Responden Tentang Peranan pemerintah dalam perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	32	80
2	Baik	6	15
3	Kurang baik	2	2
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 15 September 2013

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat digambarkan tanggapan responden mengenai peranan pemerintah dalam perencanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari Persentase yang diperoleh berdasarkan pertanyaan yang ditujukan kepada 40 reponden, diketahui 32 responden atau 80 persen menyatakan sangat baik, dimana pada setiap kegiatan yang dilakukan peran serta pemerintah baik itu pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah kabupaten (Dinas PU), maupun pemerintah setempat yaitu pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, utamanya Kepala Lingkungan/Kepala Dusun sebagai pemerintah terdekat , mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan BSPS tersebut. Hal ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan bahwa :

“Pemerintah kecamatan sangat merespon bila ada masyarakat yang merasa dirugikan dalam perencanaan BSPS karena masyarakat sangat membutuhkan rumah layak huni sebagai tempat yang layak untuk mereka tinggal”. (Wawancara, AT, 15 Sepetember 2013).

Responden yang menyatakan baik sebanyak 6 responden atau 15 persen, hal ini didasarkan ataupun sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh responden (Wawancara, AP, 15 September 2013) bahwa “Dalam perencanaan BSPS selain melibatkan pemerintah setempat sebagai peserta, masyarakat sasaran program juga dilibatkan dalam perencanaannya”.

Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 2 atau 5 persen, didasarkan pada argumentasi responden (Wawancara, AY, 15 September 2013) bahwa “Pemerintah setempat dalam hal ini kepala kelurahan kadang kurang memperhatikan aspirasi yang ada”.

Tanggapan responden yang telah disajikan pada tabel 2 di atas, dapat diinterpretasikan bahwa peranan pemerintah dalam perencanaan program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dikategorikan sudah sangat baik, terbukti dengan hasil yang didapat yang ada pada table 2 diatas.

2. Peran pemerintah dalam pelaksanaan

Dalam keterkaitannya peranan pemerintah dalam melaksanakan tugas perlu hati-hati dalam artian bahwa perlu tersedia data yang akurat tentang warga masyarakat yang layak menerima bantuan, baik itu data nama-nama penerima, lokasi dan jumlah penerima.

Untuk memperoleh data yang akurat, pemerintah kelurahan/desa harus berkondinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat), dinas PU kabupaten agar tidak terjadi kesimpang siuran data. Hal ini relevan dengan pendapat yang di kemukakan oleh salah seorang informan bahwa :

“Idealnya pemerintah setempat seharusnya dalam melaksanakan tugas, mereka harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar program tepat sasaran, sehingga kepuasan masyarakat khususnya penerima BSPS dapat terwujud. Kriteria warga miskin juga perlu konkrit sehingga penafsiran yang berbeda dari setiap pihak yang terkait bisa dihindari”. (Wawancara ST, 15 September 2013).

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh pedataan akurat dan penafsiran yang tepat tentang siapa yang masuk kategori rumah tangga miskin dimana indikator masyarakat miskin dapat dilihat dari penghasilan sehari-hari yang rendah sehingga layak dibantu, bukan berdasarkan pertimbangan kedekatan emosional dengan pengambil kebijakan ditingkat kelurahan/desa. Karena sering kali dalam program pemerintah pusat tidak tepat sasaran, hal ini menyebabkan munculnya polemik antar warga. Untuk melihat lebih detail, tentang pelaksanaan tugas pemerintah disajikan dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 : Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan tugas pemerintah dalam dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

No	Kategori jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	12	30
2	Baik	23	57,50
3	Kurang baik	5	12,50
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner, 15 September 2013

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat digambarkan tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas dalam implementasi program BSPS, dimana

persentase yang diperoleh berdasarkan pertanyaan yang ditujukan kepada 40 responden, diketahui 12 responden atau 30 persen yang menyatakan sangat baik dengan alasan bahwa pemerintah kelurahan/desa sudah tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Responden yang menyatakan baik sebanyak 23 responden atau 57,50 persen dimana dengan alasan bahwa masyarakat yang menerima dicatat dalam bentuk kartu kontrol dan diberikan tanda paraf oleh petugas setempat. Responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 5 responden atau 12,50 persen didasarkan pada alasan bahwa masih ada ketidakcocokan pendataan warga miskin dengan aparat pemerintah sendiri yang melakukan penyaluran, namun fakta dilapangan masih ada beberapa orang yang layak mendapatkan program tersebut. Pendapat responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pemerintah sudah baik, relevan dengan pendapat salah seorang informan yang menyatakan bahwa :

“Peranan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sangat baik karena masyarakat menilai pemerintah sudah memberikan pelayanan yang baik dan pemerintah mendata masyarakat yang betul-betul layak dan sangat membutuhkan”. (Wawancara, DSSA, 15 September 2013).

Uraian di atas di interpretasikan bahwa pelaksanaan tugas sudah berjalan efektif, namun masih perlu koordinasi yang rutin dengan RT/RW tentang kriteria yang konkrit rumah tangga miskin.

Berdasarkan hasil pengamatan yang diamati, peneliti memperlihatkan bahwa peranan pemerintah dimana peranan kepala lingkungan dalam pelayanan sudah bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat. Upaya yang penting dilaksanakan oleh pihak yang terkait agar sering melakukan monitoring dan

evaluasi data agar tidak terjadi distorsi atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi itu dilakukan dalam bentuk pemberian. Utamanya adalah pentingnya peranan pemerintah baik itu dalam bentuk peninjauan langsung ataupun dalam bentuk data yang valid agar proses penerimaan tepat sasaran dan berjalan dengan baik.

3. Peran pemerintah dalam evaluasi

Salah satu tugas pemerintah atau aparat yang terkait dalam menjalankan suatu program adalah melaksanakan wewenang atau tanggung jawab sebagai pelayan publik atau masyarakat. Perluanya evaluasi terhadap setiap kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercipta sebuah kenyamanan dan kepuasan pelayanan. Untuk itu pemerintah harus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut dan perlunya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik terutama dalam implementasi program BSPS.

Tabel 4 : Tanggapan Responden Tentang kepuasan hasil kerja pemerintah dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sangat puas	25	62,50
2	Puas	12	30
3	Kurang puas	3	7,50
4	Tidak puas	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner, 15 September 2013

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat digambarkan tanggapan responden mengenai indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelayanan publik. Persentase yang diperoleh berdasarkan pertanyaan yang ditujukan kepada 40 responden dimana yang menyatakan sangat puas 25 responden atau 62,50 persen, Kepala kelurahan/desa selaku pemerintah setempat mempunyai wewenang untuk memerintah atau mengarahkan bawahannya. Responden yang menyatakan puas 12 responden atau 30 persen, responden berpendapat bahwa selain peran Kepala kelurahan/desa dan kepala lingkungan, peranan tokoh masyarakat juga sangat penting, mengingat proses pelaksanaannya membutuhkan kerjasama semua pihak yang terkait. Responden yang menyatakan kurang puas sebanyak 3 responden atau 7,50 persen responden berpendapat terkadang pemerintah tidak menginformasikan proses kerja program. Pendapat yang dikemukakan informan (Wawancara, BT, 15 September 2013) bahwa “Sangat pentingnya kepuasan masyarakat dan

perlunya perhatian dari pemerintah dalam memberi pelayanan sehingga adanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah”.

Tanggapan responden yang disajikan pada tabel 5 diatas dapat diinterpretasikan bahwa kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah harus dipertahankan dan sering-sering dilakukan, mengingat masyarakat menginginkan agar didalam implementasi program berjalan tanpa adanya suatu masalah. Perlunya etika dan moral pemerintah dalam memberikan pelayanan sehingga ada kepuasan dan kenyamanan masyarakat akan pelayanan dari pemerintah. Untuk itu pemerintah setempat dalam hal ini Kepala lingkungan harus dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, selain peran dari Kepala Kelurahan/desa peranan tokoh masyarakat juga sangat penting, dalam hal pengawasan agar pelaksanaannya dapat berjalan baik

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

1. Faktor penghambat

Sejalan dengan uraian dalam pembahasan hasil penelitian terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya suatu kegiatan, utamanya dalam Peranan Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (pelayanan jasa implementasi program BSPS) yang ada di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Untuk itu dapat dilihat beberapa faktor-faktor penghambat sebagai berikut.

a. Kelengkapan sarana dan prasarana

Faktor kemampuan dan keterampilan petugas dan Faktor sarana/prasarana mempengaruhi terlaksananya pelayanan yang *excellent*. Pelayanan Merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kinerja pelayanan. Faktor sarana terdiri dari sarana kerja dan fasilitas kerja. Sarana kerja adalah semua benda yang berfungsi secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan misalnya mesin ketik (komputer), perlengkapan komunikasi dan lain-lain. Perlengkapan sarana ini pulalah yang sangat mendukung terhadap kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan. Sebaliknya, sulit mendapatkan layanan yang baik apabila penunjang sarana kelengkapan sangat terbatas pada suatu organisasi sehingga pihak birokrasi yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat sangat menekankan pada tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan suatu kegiatan terdapat banyak kendala-kendala yang dapat mempengaruhi jalannya suatu kegiatan, hal ini bukan saja di instansi pemerintah akan tetapi dalam instansi swasta pun sering mengalami kendala-kendala tersebut.

Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan peranan pemerintah dalam pelayanan publik (pelayanan jasa implementasi program BSPS) yaitu pendistribusian yang sering mengalami keterlambatan karena kurang lengkapnya sarana dan prasarana dikantor kelurahan

Berikut tanggapan responden tentang kelengkapan sarana dan prasarana di kantor kelurahan/desa dalam memberikan pelayanan :

Tabel 5 : Tanggapan Responden Tentang kelengkapan sarana dan prasarana Kelurahan/Desa di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sangat lengkap	10	25
2	Lengkap	9	22,50
3	Kurang lengkap	21	52,50
4	Tidak lengkap	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : Hasil olahan kuesioner, 15 September 2013

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat digambarkan tanggapan responden tentang kelengkapan sarana dan prasarana dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, persentase responden berdasarkan pertanyaan yang ditujukan kepada 40 responden, dimana responden yang menyatakan sangat lengkap 10 responden atau 25 persen, hal ini dilakukan pada argumentasi responden bahwa sudah ada komputer untuk mengelolah data. Responden yang menyatakan lengkap 9 responden atau 22,50 persen, sedangkan responden yang menyatakan kurang lengkap 21 responden atau 52,50 persen, dimana dalam pendistribusian.

Keterkaitnya sarana dan prasarana dengan implementasi program rumah layak huni (BSPS) sering kali terlambat disebabkan kurang memadainya sarana dan prasarana seperti mesin ketik (kemputer). Adanya sarana dan prasaran dikantor merupakan faktor pendukung agar

berjalan lancarnya aktifitas di kantor. Ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan bahwa :

“Kurangnya Kelengkapan sarana dan prasarana di kantor merupakan faktor penghambat pemerintah dalam melayani masyarakat. Keterlambatan dalam implementasi program merupakan salah satu hambatan karena kurangnya kelengkapan sarana di kantor. (Wawancara, SP, 15 September 2013).

b. Kedisiplinan

Kendala ini sangat sering dijumpai bukan hanya pada implementasi program BSPS saja, akan tetapi pada program-program pemerintah lainnya yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak berkecukupan atau tidak mampu.

Sering terjadinya kurang disiplin pegawai sehingga masyarakat terkadang mengeluh dengan birokrasi di kantor, perlunya pelayanan yang betul-betul melayani masyarakat dan kedisiplinan terutama tidak terlambat ke kantor sehingga masyarakat tidak mengeluh tentang kedisiplinan pegawai.

Untuk melihat kedisiplinan pegawai dalam perhatian pemerintah dalam implementasi program BSPS, maka dapat dilihat tabel di bawah ini

Tabel 6 : Tanggapan Responden Tentang kedisiplinan aparat pemerintah dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sangat disiplin	9	22,50
2	Disiplin	11	27,50
3	Kurang disiplin	20	50
4	Tidak disiplin	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner, 15 September 2013

Berdasarkan tabel 6 tersebut, dapat digambarkan tanggapan responden mengenai kedisiplinan pemerintah dalam imlementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, persentase responden berdasarkan pertanyaan yang ditujukan kepada 40 responden dimana responden yang menyatakan sangat disiplin 9 responden atau 22,50 persen, responden yang menyatakan disiplin 11 responden atau 27,50 persen, data tersebut dikelola dari pemerintah setempat yang mengetahui keadaan penduduknya. Sedangkan yang menyatakan kurang perhatian 20 responden atau 50 persen, karena masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan rumah layak huni tersebut akan tetapi tidak terdata oleh pusat.

Uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa sangat perlunya perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini juga diperkuat oleh informan yang di wawancarai oleh peneliti, bahwa:

“Masyarakat sangat membutuhkan perhatian pemerintah agar pemerintah tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama dalam kedisiplinan pegawai dalam melayani masyarakat. Demikian responden berpendapat, dapat dimaklumi karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang baik dari pemerintah dan perlunya kepala kelurahan/desa tegas terhadap pegawai dan memberi sanksi bila terjadi pelanggaran. Sehingga, adanya kesadaran bagi pegawai. (Wawancara K A, 15 September, 2013).

2. Faktor pendukung

Selain faktor penghambat didalam menjalankan suatu kegiatan terdapat pula faktor-faktor pendukung yang dapat menunjang dalam menjalankan suatu kegiatan tersebut.

Adapun faktor yang mendukung perlu karena akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

- a. Sumber daya manusia sangat perlu agar pemerintah bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik yang di berikan kepada masyarakat dan kemampuan institusi dalam pelayanan akan kebutuhan masyarakat dan keaktifan dalam memberikan pelayanan secara tepat dan tanggap yang merupakan ketulusan dalam menolong pelanggan atau konsumen dan memberikan pelayanan ketepatan waktu. Apabila kita tinjau dari segi kualitas, maka secara umum dapat dikategorikan sangat mampu, karena kalau kita lihat tingkat pendidikan aparat di Kecamatan Bontonompo. Hal ini menurut mereka karena teori-teori yang didapat pada saat mengikuti pendidikan formal tersebut tidak berhubungan dengan bidang tugas yang dipikul, selain itu pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah jarang atau tidak sama

sekali mereka ikuti. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pelayanan mereka hanya mengacu pada kebiasaan atau rutinitas yang mereka lakukan, padahal rutinitas itu mungkin sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dilapangan.

- b. Etika dan moral merupakan hal terpenting yang dimiliki pemerintah dalam melayani masyarakat dan adanya perasaan yang nyaman yang mereka rasakan terhadap pelayanan pemerintah. Hak dan kewajiban memberi dan menerima pelayanan masyarakat harus jelas dan diketahui secara pasti. Pelayanan yang mempunyai kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan pemahaman atas kebutuhan masyarakat. Pemberian perlindungan yaitu memberikan perhatian pada masyarakat. Perlunya kesopan santunan dan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Selain itu masyarakat dapat terpuaskan dari pelayanan aparatur (pemerintah) dengan berorientasi pada kepuasan total pelanggan (masyarakat) yang membutuhkan komitmen dan tindakan yang nyata dalam memberikan pelayanan prima.

Standar pelayanan bagi unit pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat. Standar pelayanan adalah perkiraan kebutuhan pelanggan yang baku sehingga bermanfaat memperjelas tugas pelayanan, menyampaikan kepada masyarakat tugas yang diprioritaskan sehingga mereka dapat mengerti dan sabar menunggu giliran pelayanannya serta menyediakan tempat yang jelas bagi pelanggan

atau masyarakat sehingga pegawai dapat menilai performancenya dan melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Tabel 7 : Tanggapan responden tentang etika dan moral aparat dalam dalam implementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	10	25
2	Baik	25	62,50
3	Kurang baik	5	12,50
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	40	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner, 15 September 2013

Berdasarkan tabel 7 tersebut, dapat digambarkan tanggapan responden mengenai etika dan moral pemerintah dalam imlementasi program BSPS di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, dimana persentase responden berdasarkan pertanyaan yang ditujukan kepada 40 responden, diketahui 10 responden atau 25 persen menyatakan sangat baik karna adanya rasa nyaman masyarakat dalam pelayanan yang diberi pemerintah. Responden yang menyatakan baik 25 reponden atau 62,5 persen, perlunya etika pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa dilayani oleh pemerintah, responden yang menyatakan kurang baik 5 responden atau 12,50 persen. Hal ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan bahwa :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV yang mengungkap tentang “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”. Maka hasil dari pengolahan data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Peranan Pemerintah Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain peranan pemerintah dalam perencanaan program ada 32 responden atau 80% yang memberi tanggapan sangat merespon. Hasil ini tercipta karena selain pemerintah masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan.
2. Mengenai pelaksanaan tugas sebanyak 12 responden atau 30% yang memberikan tanggapan sangat baik, dan 23 responden atau 57,50% mengatakan baik. Salah satu faktor pendukungnya adalah dikarenakan pendataan pemerintah betul-betul ditujukan kepada masyarakat miskin.
3. Tentang evaluasi program yaitu 25 responden atau 62,50% yang memberikan tanggapan sangat puas. Hal ini dikarenakan aktifnya

koordinasi antara lurah/desa dengan kepala lingkungan, kepala dusun, RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat hingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

Dengan berdasarkan pada kesimpulan diatas maka, penulis akan menyampaikan beberapa saran dalam rangka peningkatan peranan pemerintah di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam implementasi program BSPS seharusnya bisa meningkat karena hal ini dapat membantu beban masyarakat. Pemerintah juga harus lebih berhati-hati dan teliti dalam proses pendataan masyarakat yang layak menerima bantuan hingga pada hasil akhirnya tidak terjadi polemik ataupun problem di masyarakat. Selain hal diatas, perlunya pengadaan ataupun penambahan komputer dikantor lurah/desa hingga pada saat pendataan ataupun pengimputan data dapat berjalan dengan cepat utamanya dalam memberi pelayanan untuk masyarakat hingga terciptanya pelayanan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azikin Sholtan. 2011. *Format Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Ombak.
- Anderson, Charles W. 1979. *The Place of Principles in Policy Analysis*. American Political Science Review.73,p. 723
- Abdul.Malik.2012. [Id.shvoong.com/social-sceinces/sociologi/2205936-Pengertian-Pelaksanaan-Actualiting/Makassar](http://id.shvoong.com/social-sceinces/sociologi/2205936-Pengertian-Pelaksanaan-Actualiting/Makassar) 5 November 2013
- Deputi Bidang Perumahan Swadaya, KEMENPERA RI. 2013. *Panduan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta Selatan.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Lukman 2000 *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press : Jakarta.
- Moenir 2000, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo.
- Osmar Mungkas. 2011. *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perumahan Swadaya*. One line : <http://www.academia.edu/3523386.makassar> 12 februari 2013.
- Parsons, Wayne. 2001. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Terj. Triwibowo Budi Santoso). Jakarta: Kencana.
- Preston, Lee E. and James E. Post. 1975. *Private Management and Public Policy*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, p. 11
- Sampara 2000. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Sinambela 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara : Jakarta
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Keempat, Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

W.N. Dunn and R.M. Kelly, eds. *Advance in Policy Studies Since 1950*. New Brunswick, NJ: Transaction.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wakhinuddin.wordpress.com/2009/07/14/devenisi-evaluasi/Makassar
November 2013. 5

Zuhairistain.blogspot.com/2013/03/pengertian-perencanaan.html/Makassar
November 2013 5

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2011.